

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik yang paling kompleks, berlarut-larut, dan memengaruhi dinamika politik internasional hingga saat ini. Konflik ini tidak hanya melibatkan dua negara atau bangsa, tetapi juga menjadi isu global yang menyeret perhatian dunia karena keterlibatan aktor-aktor internasional dari segi politik, ekonomi, maupun kemanusiaan. Sejak deklarasi pendirian negara Israel pada tahun 1948, Palestina telah mengalami proses pendudukan wilayah, pengusiran warga sipil, pelanggaran hak asasi manusia, serta marginalisasi identitas budaya dan politik.

Serangan Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat serius dan berkepanjangan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina dan laporan PBB, selama periode tersebut lebih dari 45.000 hingga lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, akibat serangan militer yang intensif dan blokade ketat yang hampir memutus akses rakyat Gaza terhadap kebutuhan pokok. Israel diduga melanggar Konvensi Genosida PBB 1948 terutama pasal II yang melarang tindakan yang mengarah pada penghapusan suatu kelompok, serta hukum internasional lain yang berkaitan dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang diadopsi oleh PBB dan ICC seperti pasal 5 Statuta Roma.

PBB melalui pelapor khusus dan mekanisme independen telah menganggap tindakan Israel sebagai genosida dan pelanggaran hak asasi manusia serius,

sekaligus menyerukan pertanggungjawaban internasional atas tindakan tersebut. Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di wilayah Palestina Francesca Albanese, dalam laporannya yang berjudul “Anatomi sebuah Genosida”, menyatakan adanya alasan yang masuk akal untuk meyakini Israel telah melakukan sejumlah tindakan genosida di Gaza dan pembersihan etnis. Laporan ini mengungkapkan pelanggaran yang sesuai dengan tiga dari lima aturan dalam Konvensi Genosida PBB. Laporan ini dipresentasikan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2024.¹

Banyak negara dan kelompok masyarakat sipil berupaya memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan Palestina, serta meningkatkan kesadaran akan isu ini ditingkat global. Selain organisasi kemanusiaan, masyarakat diberbagai negara sering kali mengadakan aksi massa sebagai bentuk gerakan sosial global untuk membentuk solidaritas terhadap Palestina dengan menegcam tindakan Israel. Bentuk gerakan tersebut adalah gerakan aksi global untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel yang dikenal dengan nama *Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)*.

Gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)* adalah kampanye internasional yang bertujuan untuk mendelegitimasi dan menekan Israel, melalui isolasi diplomatik, keuangan, profesional, akademis dan budaya terhadap Israel, individu-individu Israel, lembaga-lembaga Israel, dan semakin banyak orang

¹ "Pakar PBB: Israel Lakukan Genosida di Gaza, Serukan Embargo Senjata," VOA Indonesia, diakses 1 Agustus 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-israel-lakukan-genosida-di-gaza-serukan-embargo-senjata/7544149.html>.

Yahudi yang mendukung hak eksistensi Israel.² Gerakan BDS dimulai pada tahun 2005 oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina. BDS menyerukan aksi boikot, penarikan investasi, dan sanksi internasional terhadap Israel hingga hak-hak rakyat Palestina diakui sepenuhnya atas inisiatif masyarakat sipil Palestina sebagai respons terhadap pelanggaran sistematis terhadap hak-hak rakyat Palestina.³ Aksi gerakan global ini mencerminkan upaya kolektif untuk menuntut keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun tantangan besar masih ada, aksi gerakan global akan memberikan harapan bagi rakyat Palestina dan menunjukkan bahwa dunia tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan yang terjadi.

Gerakan BDS telah berkembang menjadi gerakan sosial global yang melibatkan berbagai aktor lintas negara, termasuk serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok mahasiswa yang memanfaatkan media sosial dan jaringan komunikasi internasional untuk mengangkat isu HAM Palestina ke panggung dunia. Gerakan sosial global (*global social movement*) dalam perspektif ilmu Hubungan Internasional adalah fenomena kolektif di mana masyarakat lintas negara bersatu untuk merespons isu-isu global, seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan, atau konflik internasional melalui aksi-aksi non-negara yang terorganisir dan sering kali bersifat nir-kekerasan.⁴ Gerakan BDS merupakan bentuk perlawanan yang bersifat nir-kekerasan yang telah berkembang menjadi

² Anti-Defamation League, "Boycott, Divestment and Sanctions Campaign (BDS)," ADL, diakses January 14, 2025. <https://www.adl.org/resources/backgrounder/boycott-divestment-and-sanctions-campaign-bds>.

³ Muhammad Saud, "Munculnya Gerakan-Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Konteks Palestina," Universitas Airlangga, 13 November 2023, diakses June 25, 2025. <https://unair.ac.id/munculnya-gerakan-gerakan-boikot-divestasi-dan-sanksi-bds-konteks-palestina/>.

⁴ Anne Margareth et al., "Global Social Movement: Upaya Masyarakat Internasional dalam Merespon Tindak Kejahatan Genosida Melalui Resolusi Konflik Nir-Kekerasan pada Kasus Israel–Palestina," Jurnal Analisa Sosiologi 13, no. 1 (2024), diakses June 25, 2025. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/95593>

gerakan global, dimana tekanan terhadap Israel dilakukan oleh berbagai individu dan organisasi di seluruh dunia.

Dalam kerangka gerakan sosial, BDS memobilisasi solidaritas lintas negara melalui aksi boikot produk dan lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Taktik boikot ini merupakan respons langsung terhadap pelanggaran HAM dan dianggap sebagai cara efektif untuk menekan Israel secara ekonomi dan politik tanpa menggunakan kekerasan. BDS juga mengadvokasi divestasi dan sanksi sebagai instrumen untuk memutuskan dukungan finansial dan politik terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina.⁵ BDS sebagai gerakan sosial mendapat inspirasi dari gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan yang berhasil menekan rezim rasial melalui gerakan solidaritas global. Kesamaan konteks penjajahan dan diskriminasi rasial membuat BDS mengambil model organisasi dan aksi dari pengalaman historis tersebut. Gerakan ini menunjukkan dinamika sosial dan politik yang khas dengan membangun kampanye global yang koheren dan berorientasi pada perubahan struktural.

Isu HAM menjadi fondasi utama gerakan BDS, seperti tercermin dalam tiga tuntutan utama mereka: penghentian pendudukan dan apartheid, pengakuan hak-hak warga Palestina di Israel, dan pemulangan pengungsi Palestina sesuai Resolusi PBB No.194. Dalam konteks genosida yang dituduhkan terhadap Israel, BDS menggunakan isu pelanggaran HAM sebagai alat politik yang kuat untuk membangkitkan kesadaran internasional. Mereka menyoroti tindakan militer brutal, pemindahan paksa, dan pembunuhan massal yang dianggap sebagai elemen

⁵ Ayu Jelita Ningrum dan Akhirul Aminulloh, "Vigilantisme Digital dalam Aksi Boikot Produk Israel di Media Sosial," Jurnal Komunikasi Nusantara 6, no. 1 (2024): 145–60, E-ISSN 2685-7650.

genosida terhadap masyarakat Palestina. Penyebaran informasi ini menjadi kunci dalam memperkuat kampanye global BDS. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi pada Israel dengan cara mengurangi pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, terutama setelah eskalasi kekerasan di Gaza pasca 7 Oktober 2023.

Menggunakan isu hak asasi manusia, gerakan ini mencoba mendapatkan solidaritas dan dukungan internasional untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami oleh Palestina akibat kebijakan Israel.⁶ BDS menyerukan solidaritas global berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan HAM yang bersifat universal. Pada dasarnya gerakan ini bertujuan melawan apartheid dan genosida yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap warga Palestina bukan melawan identitas agama atau etnis. Penyebaran gerakan BDS terjadi secara global dengan berbagai bentuk dukungan, terutama di negara-negara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa isu HAM telah berhasil menjadi isu global yang menggerakkan komunitas internasional untuk bertindak.

Sebagai sebuah gerakan sosial global, BDS tidak sekedar menjadi jaringan solidaritas, melainkan sebuah entitas kolektif yang terorganisir dengan strategi dan taktik yang jelas dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana strategi BDS dalam mengoperasionalkan isu HAM dalam konteks repertoar aksi kolektif untuk merespon genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap Palestina. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan

⁶ Sherry Wolf, "Ada Apa Di Balik Kebangkitan BDS?", diterjemahkan oleh Aghe Bagasatriya, *International Socialist Review*, edisi #93, Summer 2014, diakses melalui ArahJuang, July 25, 2025. <https://www.arahjuang.com/2016/11/08/ada-apa-di-balik-kebangkitan-bds/>

praktis dalam memahami dinamika gerakan sosial global yang berorientasi pada penegakan keadilan dan hak asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik Israel-Palestina masih terus berlangsung dan menimbulkan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh rakyat Palestina. Pelanggaran tersebut bahkan oleh sejumlah pihak dikategorikan sebagai genosida, telah menimbulkan keresahan dan simpati luas ditingkat global. Salah satu respon penting terhadap situasi ini adalah munculnya gerakan global *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS) yang mengusung tuntutan penghentian penjajahan Israel melalui berbagai aksi non-kekerasan berbasis solidaritas internasional. BDS sering kali dipandang sebagai jaringan solidaritas global, padahal secara konseptual gerakan ini juga merupakan sebuah gerakan sosial yang terorganisir dengan *social movement* yang khas. Oleh karena itu, peneliti akan mengeksplorasi gerakan global BDS memanfaatkan isu HAM sebagai landasan moral dan politik dalam strategi aksi mereka secara terstruktur dan berkelanjutan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah Bagaimana strategi gerakan global *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS) dalam merespon genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina?.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana strategi gerakan *global Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS) menggunakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai klaim kolektif dalam merespons genosida yang

diduga dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai bentuk aksi serta strategi terorganisir yang diterapkan BDS dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui *social movement* menurut Charles Tilly. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pemahaman teoritis dan empiris mengenai strategi gerakan sosial global yang berfokus pada penegakan keadilan dan penghormatan hak asasi manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai klaim kolektif dalam strategi gerakan sosial, dalam hal ini gerakan BDS dalam konteks konflik Israel-Palestina. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan menyajikan analisis empiris yang komprehensif mengenai strategi gerakan sosial yang bersifat global dan terorganisir secara sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi yang tertarik pada studi gerakan sosial dan hak asasi manusia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi para aktivis, penggerak masyarakat sipil, dan organisasi advokasi Hak Asasi Manusia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kampanye yang efektif dengan basis isu HAM. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan dalam memperkuat pergerakan sosial yang berorientasi pada upaya penegakan keadilan dan penghormatan HAM dalam berbagai konteks konflik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat mendorong dialog dan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan yang kompleks.

1.6 Studi Pustaka

Dalam proses menganalisis masalah dan mencari jawaban masalah, penelitian ini mengacu kepada literatur dan penelitian sebelumnya yang dilihat relevan dengan topik yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan yang timbul, serta untuk pembaharuan dari penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Tinjauan pustaka yang pertama adalah berasal dari artikel jurnal yang berjudul *“The Influence of Social Movements on the International Legal Process: A Case Study of the Israeli-Palestinian Conflict in the International Court of Justice”* ditulis oleh Mutmainnah, F. A. Artikel ini menganalisis menganalisis bagaimana gerakan sosial memengaruhi proses hukum internasional, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Penelitian ini fokus pada peran gerakan sosial Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang bertindak sebagai mobilisasi global dalam mendukung isu-isu Palestina melalui advokasi dan tekanan publik yang memengaruhi proses dan keputusan hukum internasional. Studi ini menyoroti efektivitas penggunaan media sosial oleh gerakan BDS untuk menyebarkan informasi dan mengorganisasi solidaritas secara global.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus studi kasus. Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaruh gerakan sosial dalam proses

⁷ Mutmainnah, F. A. (2024). The Influence of Social Movements on the International Legal Process: A Case Study of the Israeli-Palestinian Conflict in the International Court of Justice. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 7(2), 62-109. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/11086>

hukum internasional dengan menggunakan kasus konflik Israel-Palestina di Mahkamah Internasional sebagai objek studi. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, politik, dan hukum secara komprehensif serta menafsirkan data secara mendalam berdasarkan studi literatur, dokumen hukum, dan sumber primer serta sekunder terkait kasus tersebut.

Dalam artikel ini penulis menggunakan perspektif teori yang menyoroti peran gerakan sosial khususnya gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) dalam mempengaruhi proses dan keputusan hukum internasional. Penelitian ini menempatkan teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) sebagai kerangka konseptual utama untuk menjelaskan keberhasilan gerakan sosial tersebut dalam mengorganisir solidaritas global dan memanfaatkan media sosial sebagai alat mobilisasi efektif dalam advokasi mereka.

Artikel ini berfokus pada peran gerakan sosial termasuk BDS dalam memobilisasi opini publik dan menekan proses hukum internasional, seperti sidang ICJ terkait tembok pemisah Israel. Namun, penelitian Mutmainnah lebih menitikberatkan hubungan antara gerakan sosial dan proses hukum (*legal process*), bukan pada analisis mendalam isu HAM sebagai identitas kolektif gerakan BDS di tataran politik dan diplomasi internasional. Penelitian ini belum membahas secara eksplisit bagaimana isu HAM dijadikan identitas kolektif strategis oleh BDS serta dampaknya terhadap relasi diplomatik negara. Maka dari itu dalam penelitian kali ini akan menawarkan analisis lebih komprehensif mengenai HAM sebagai landasan dan strategi gerakan BDS dalam konteks politik internasional.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah artikel yang berjudul “Gerakan Sosial Aksi Boikot Melalui *Social Identity Model of Collective Action* Pada Isu Bela

Palestina” ditulis oleh Ahmad Helmi Nugraha, Karolina Lamtiur Dalimunthe, Zainal Abidin, Yuliana Hanami. Artikel ini membahas tentang bahwa gerakan boikot bukan sekadar tindakan konsumsi, melainkan ekspresi solidaritas yang kuat terhadap isu pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Palestina. Identitas sosial yang terbentuk dalam kelompok pendukung Palestina memperkuat rasa kebersamaan dan motivasi untuk bertindak bersama melalui boikot produk pro-Israel. Selain itu, keyakinan moral dan persepsi ketidakadilan menjadi pendorong emosional yang mengaktifkan partisipasi dalam gerakan ini. Artikel ini juga membahas efektivitas, tantangan, dan kritik terhadap gerakan boikot, memberikan wawasan praktis bagi aktivis dan pembuat kebijakan dalam merancang kampanye boikot yang lebih strategis dan berdampak. Studi ini berkontribusi secara teoritis dengan memperluas penerapan model SIMCA dalam konteks gerakan sosial yang berbasis identitas dan nilai moral di Indonesia.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan literatur yang relevan untuk mengkaji fenomena gerakan boikot produk Israel di Indonesia. Studi ini mengadopsi kerangka teori *Social Identity Model of Collective Action (SIMCA)* yang dikembangkan oleh Van Zomeren et al. tahun 2008. Pendekatan ini menekankan bahwa aksi kolektif seperti boikot dipicu oleh tiga faktor utama: (1) Identitas sosial yang menguatkan rasa kebersamaan dalam kelompok, (2) Persepsi ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok, (3)

⁸ Ahmad Helmi Nugraha, Karolina Lamtiur Dalimunthe, Zainal Abidin, dan Yuliana Hanami, “Gerakan Sosial Aksi Boikot Melalui *Social Identity Model of Collective Action* Pada Isu Bela Palestina,” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 11, no. 2 (2024): 82–94, diakses June 25, 2025. <https://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/download/685/100/2321>.

Efikasi kelompok yaitu keyakinan bahwa tindakan kolektif dapat membawa perubahan.

Artikel ini menggunakan perspektif sosiologis dan psikososial yang menempatkan gerakan boikot sebagai bentuk aksi kolektif yang berakar pada identitas sosial dan motivasi moral. Perspektif ini menyoroti: (a) Identitas sosial sebagai faktor utama yang mengikat individu dalam kelompok yang memiliki tujuan bersama, dalam hal ini solidaritas terhadap Palestina. (b) Kemarahan moral dan keyakinan agama sebagai pendorong intrinsik yang memperkuat motivasi individu untuk berpartisipasi dalam boikot sesuai dengan temuan Zeineddin & Leach tahun 2021 yang menyatakan bahwa kemarahan moral berbasis agama dapat memicu aksi kolektif. (c) Ketidakadilan yang dirasakan sebagai pemicu utama partisipasi, di mana persepsi terhadap pelanggaran HAM oleh Israel menjadi alasan utama solidaritas dan aksi boikot. (d) Efikasi kelompok, yaitu keyakinan bahwa gerakan boikot dapat efektif dalam membawa perubahan sosial dan politik.

Artikel ini menyimpulkan bahwa gerakan boikot produk Israel di Indonesia merupakan aksi kolektif yang didorong oleh interaksi kompleks antara identitas sosial, ketidakadilan yang dirasakan, efikasi kelompok, dan nilai moral, yang bersama-sama membentuk solidaritas dan tindakan nyata dalam isu bela Palestina. Artikel ini menjadi rujukan penulis untuk melihat wawasan mendalam mengenai kerangka teori SIMCA untuk memahami gerakan boikot produk Israel di Indonesia dari perspektif identitas sosial, ketidakadilan, dan efikasi kelompok yang didukung oleh motivasi moral dan agama.

Tinjauan pustaka yang ketiga adalah artikel berjudul “Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Pro-Israel 2024” yang ditulis oleh Ibtisamah Laila, Mira

Mariani, Rakhmah Fakhriani dan Rinjania. Artikel ini membahas dampak sosial dari gerakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel, terutama dalam konteks Indonesia. Gerakan boikot berfungsi sebagai simbol solidaritas kemanusiaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Namun, penulis menekankan perlunya pengelolaan yang baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap tenaga kerja domestik. Masyarakat diimbau untuk mendukung boikot secara strategis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja nasional.⁹

Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun gerakan boikot memiliki potensi untuk mendukung perjuangan Palestina dan meningkatkan produk lokal, perlu ada perhatian terhadap dampak sosial yang mungkin timbul, terutama dalam hal ketenagakerjaan di Indonesia. Dukungan untuk boikot harus dilakukan dengan strategi yang mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peneliti akan merujuk artikel ini untuk melihat wawasan penting tentang bagaimana gerakan sosial dapat mempengaruhi dinamika ekonomi dan sosial di tingkat lokal sambil mendukung isu-isu global seperti keadilan untuk Palestina.

Tinjauan pustaka yang keempat adalah artikel yang berjudul “*Nonviolence and (De)legitimacy: BDS and the Formal Palestinian Political Process*” yang ditulis oleh Philippa Barnes. Artikel ini membahas tentang dinamika legitimasi kepemimpinan di dalam gerakan pembebasan Palestina, khususnya dalam konteks hubungan antara gerakan non-kekerasan *Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)* dengan proses politik Palestina formal. Artikel ini menyoroti bagaimana BDS yang

⁹ Ibtisamah Laila, Mira Mariani, Rakhmah Fakhriani dan Rinjania. “Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Pro-Israel (2024)”. Jurnal kajian Pendidikan Islam Volume 1, Nomor 4. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Moral/article/view/436>

sepenuhnya bergerak melalui praktik non-kekerasan dan beroperasi di luar sistem politik formal, berperan sebagai strategi penting dalam perlawanan nasional Palestina setelah kegagalan proses perdamaian Oslo dan negosiasi selanjutnya.¹⁰

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menelaah gerakan non-kekerasan dalam konteks proses politik formal Palestina. Fokus utamanya adalah pada gerakan *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS) yang merupakan strategi perlawanan non-kekerasan yang sengaja menghindari sistem politik formal. Analisis diarahkan pada bagaimana gerakan BDS mempengaruhi legitimasi dan delegitimasi aktor politik dan proses politik resmi di Palestina.

Artikel ini memakai teori terkait legitimasi dan delegitimasi politik dalam konteks gerakan sosial non-kekerasan. Legitimasi dipahami sebagai pengakuan sosial yang dapat berubah dan bersifat relasional, sementara delegitimasi adalah proses berkurangnya legitimasi yang pernah ada, bukan sama dengan ketidakabsahan total. Teori ini menyoroti dinamika interaksi antara gerakan BDS (yang non-statist dan non-politik formal) dengan aktor dan proses politik formal Palestina yang berbasis negara. Dengan demikian, artikel ini memperluas diskusi mengenai efek internal gerakan non-kekerasan terhadap legitimasi kepemimpinan nasional dan proses pembebasan nasional.

Meski fokus pada proses politik internal Palestina, paparan ini kurang mengupas dimensi pengaruh gerakan terhadap hubungan internasional, sehingga

¹⁰ Philippa Barnes, Nonviolence and (de)legitimacy: BDS and the formal Palestinian political process, Umeå University, diakses tanggal 29 Juli 2025, https://www.otago.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0019/331732/philippa-barnes-nonviolence-and-delegitimacy-bds-and-the-formal-palestinian-political-process-668419.pdf.

relevan diperdalam dalam penelitian yang akan memadukan isu HAM dan dinamika politik internasional.

Tinjauan pustaka yang kelima adalah artikel yang berjudul “*The Palestinian BDS Movement as a Global Antiracist Campaign*” yang ditulis oleh Bill V. Mullen. Dalam artikel ini menyajikan analisis penting tentang bagaimana gerakan BDS yang diprakarsai masyarakat sipil Palestina sejak 2005 tidak hanya menjadi kampanye ekonomi-politik semata, melainkan juga berfungsi sebagai gerakan antirasisme global yang melintasi batas-batas nasional dengan mengintegrasikan berbagai perjuangan interetnis dan antikolonialisme di berbagai penjuru dunia. Mullen menyoroti bahwa BDS bukan hanya bertujuan menekan kebijakan Israel melalui boikot, divestasi, dan sanksi melainkan juga mengkaitkan perlawanan itu dengan narasi antirasisme yang melawan bentuk-bentuk rasisme dan kolonialisme lain secara global, termasuk Islamofobia, dan anti-Arabisme.¹¹

Artikel ini sangat relevan karena menegaskan isu HAM dan antirasisme sebagai landasan moral dan strategis utama dari gerakan BDS, yang memperkuat argumen bahwa HAM menjadi identitas kolektif yang mempersatukan para pendukung BDS lintas bangsa dan ras. Penjelasan Mullen tentang BDS sebagai bagian dari perjuangan antirasisme global membantu memahami dimensi solidaritas transnasional dan bagaimana gerakan sosial ini mempengaruhi dinamika politik internasional melalui tekanan normatif terhadap kebijakan Israel. Pendekatan ini memperkaya kerangka konseptual penelitian Anda yang mengintegrasikan teori HAM, gerakan sosial global, dan hubungan internasional.

¹¹ Bill V. Mullen, "The Palestinian BDS Movement as a Global Antiracist Campaign," *Interface: a journal for and about social movements* 13, no. 2 (December 2021): 312-322, <https://www.interfacejournal.net/wp-content/uploads/2022/03/Interface-13-2-Mullen.pdf>.

Walaupun artikel Mullen memberikan gambaran konseptual kuat soal BDS sebagai gerakan antirasisme global, ia kurang membahas secara rinci mekanisme operasional dan taktik berbasis HAM dalam memobilisasi solidaritas serta dampak konkret gerakan ini terhadap kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik antarnegara. Analisis empiris yang mendalam mengenai bagaimana isu HAM secara spesifik difungsikan sebagai identitas kolektif dan dasar perlawanan non-kekerasan dalam konteks politik internasional masih minim dalam tulisan tersebut.

Dari tinjauan pustaka yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penelitian sebelumnya menganalisis dampak yang terjadi pada gerakan global yang muncul ini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan melihat strategi yang digunakan gerakan global Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) dalam merespon tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dengan demikian *research gap* diharapkan dapat diisi dengan penelitian dan pendekatan yang lebih komprehensif dan sarat akan konteks.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan representasi visual atau naratif yang menunjukkan hubungan antar konsep yang relevan dengan topik penelitian. Ini membantu penulis memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kerangka ini biasanya dibangun berdasarkan tinjauan pustaka dan teori-teori yang ada, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial dari Charles Tilly sebagai kerangka konseptual utama karena teori tersebut secara komprehensif mampu menjelaskan dinamika, strategi, dan mekanisme aksi kolektif dalam konteks gerakan sosial modern. Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai serangkaian tindakan

perlawanan yang terorganisir dan berkelanjutan oleh kelompok yang merasa dirugikan untuk menuntut perubahan terhadap pihak yang berkuasa. Karakteristik ini sangat relevan untuk memahami gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)* yang muncul sebagai respon kolektif terhadap genosida dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap Palestina.

1.7.1 Social Movement

Gerakan sosial menurut Charles Tilly dalam bukunya *Social Movements*, 2018 didefinisikan sebagai rangkaian tindakan perlawanan yang berkelanjutan sebagai respons atas ketidakadilan yang dialami oleh kelompok yang dirugikan. Gerakan ini muncul dari interaksi berkelanjutan antara kelompok tersebut dengan pihak yang berkuasa, yang berupaya menuntut perubahan sosial dan politik melalui berbagai bentuk protes yang termasuk dalam repertoar tindakan kolektif. Tilly menekankan bahwa gerakan sosial bukan hanya sekadar aksi sporadis, melainkan terdiri dari perencanaan terorganisir yang menunjukkan solidaritas massal dan komitmen jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama.¹² Dalam teori ini ada tiga komponen utama yang akan dijadikan sebagai alat analisis oleh penulis yaitu :

- a. *Campaigns* (kampanye berkelanjutan), gerakan sosial merupakan kampanye terorganisir yang berlangsung secara berkelanjutan dan diarahkan kepada pihak berwenang yang memiliki kekuasaan. Kampanye ini tidak hanya bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sistematis untuk mencapai perubahan tertentu.

¹² Charles Tilly, *Social Movements, 1768–2018* (London: Routledge, 2018), 24–27.

b. *Repertoire of Contention* (Repertoar Aksi), gerakan sosial menggunakan berbagai bentuk tindakan kolektif yang sudah dikenal dan diterima sebagai repertoar aksi, seperti demonstrasi, boikot, mogok, dan lain-lain. Tindakan ini merupakan cara untuk menyampaikan klaim dan menunjukkan penolakan terhadap status quo.

c. *WUNC Displays* (*Manifestasi Worthiness, Unity, Numbers, Commitment*), gerakan sosial harus menunjukkan secara publik aspek keunggulan moral (*worthiness*), persatuan (*unity*), jumlah anggota yang signifikan (*numbers*), serta komitmen yang kuat (*commitment*). Semua ini penting untuk membangun legitimasi sosial dan daya tawar terhadap pihak berkuasa.

Tilly juga menekankan bahwa gerakan sosial bukan sekadar aksi insidental, melainkan bentuk perlawanan yang sadar dan berkelanjutan dengan kesadaran kolektif akan identitas dan tujuan bersama. Gerakan sosial seringkali muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan atau ketimpangan yang dialami kelompok tertentu terhadap kekuasaan atau institusi dominan. Teori Tilly akan memberikan pemahaman bahwa gerakan sosial bukan sekadar kumpulan aksi spontan, tetapi proses sosial yang melibatkan interaksi berkelanjutan antara aktor gerakan dengan latar politik dan kekuasaan yang kompleks. Hal ini penting untuk menganalisis bagaimana BDS mempertahankan keberlanjutan kampanye dan adaptasi strategi di tengah tantangan legislasi anti-BDS dan tekanan geopolitik yang menghadang gerakan tersebut.

Pemilihan teori Charles Tilly juga didasarkan pada kemampuannya untuk menghubungkan aksi kolektif lokal dengan jaringan solidaritas global, sesuai dengan karakter gerakan BDS yang bersifat transnasional dan terdesentralisasi.

Teori ini sangat relevan dalam konteks penelitian BDS karena gerakan BDS merupakan contoh nyata dari strategi gerakan sosial terorganisir yang mengembangkan aksi kolektif transnasional dalam bentuk kampanye boikot, divestasi, dan sanksi sebagai respon atas pelanggaran HAM dan genosida Israel di Palestina. Dengan menggunakan konsep Tilly, peneliti akan menjelaskan strategi BDS sebagai gerakan sosial dengan menggunakan unsur kampanye berkelanjutan, beragam repertoar aksi, dan menunjukkan public WUNC untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi moral di tingkat internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dan aturan yang menjadi pedoman oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dengan penjabaran penjelasan mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi kasus gerakan BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi) sebagai objek utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ingin menggali secara mendalam tentang strategi BDS sebagai gerakan sosial global dalam merespon Tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Secara teori, penelitian ini berlandaskan pada konsep *Social Movement* menurut Charles Tilly. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji dimensi keterkaitan BDS merespon genosida sebagai landasan moral dan strategi dalam memobilisasi solidaritas serta pengaruhnya dalam relasi internasional. Data penelitian diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi resmi, dan sumber-sumber

terkait seperti pernyataan gerakan BDS, laporan lembaga HAM, serta kebijakan luar negeri berbagai negara terhadap gerakan BDS.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial tentang bagaimana penerapan strategi gerakan BDS, serta menerapkannya terhadap hubungan internasional. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan secara kualitatif dan dianalisis secara tematik dan isi (*content analysis*), sehingga ditemukan pola dan makna penggunaan isu HAM dalam kampanye BDS dan dampaknya pada dinamika politik serta diplomasi global.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian yang berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, yaitu dari Oktober 2023 hingga saat ini. Pemilihan batas waktu ini dilakukan dengan pertimbangan untuk memperoleh data dan literatur terkini dan relevan dengan dinamika perkembangan gerakan BDS serta perubahan terkini dalam konteks HAM dan hubungan internasional. Selain itu, periode lima tahun terakhir memungkinkan peneliti untuk menangkap strategi BDS sebagai respon dari genosida Israel terhadap Palestina yang berdampak terhadap dinamika politik dan diplomasi internasional secara lebih aktual dan mendalam.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam bukunya "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*", Creswell menjelaskan bahwa unit analisis adalah entitas yang menjadi fokus penelitian, yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena sosial lainnya. Creswell juga membahas pentingnya konteks dan *setting* dalam penelitian. Unit analisis tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik

individu atau kelompok, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan politik di mana penelitian dilakukan.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah gerakan global *Boycott, Divestment, And Sanctions* (BDS), khususnya bagaimana gerakan ini memanfaatkan isu Hak Asasi Manusia sebagai landasan identitas kolektif dan strategi perlawanan terhadap Israel. Fokusnya adalah pada tindakan, narasi, strategi, dan mekanisme solidaritas yang dijalankan oleh gerakan BDS dalam konteks global. Unit eksplanasinya adalah respon gerakan sosial terhadap genosida, bagaimana strategi BDS sebagai gerakan sosial global merespon genosida di Palestina sehingga dapat mempengaruhi dinamika internasional.

Dalam "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*," Creswell menyatakan bahwa tingkat analisis dapat mencakup mikro (individu), meso (kelompok atau organisasi), dan makro (sistem atau kebijakan). Ia menekankan bahwa pemilihan tingkat analisis yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian secara efektif. Untuk itu, level analisis pada penelitian ini adalah makro. Karena dalam penelitian ini akan menganalisis pemahaman tentang dinamika global *civil society* dan strategi gerakan sosial global sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan dalam kerangka konflik Israel-Palestina.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Nasir menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan

¹³ John W. Creswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" Sage Publications (2014)

terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁴ Proses studi kepustakaan dinilai sebagai tindakan mengumpulkan sejumlah data yang nantinya dipakai penulis untuk ditambahkan atau dicantumkan ke dalam tulisannya. Dalam penelitian ini objek kajian yang akan digunakan adalah data pustaka berupa buku dan jurnal referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan organisasi non-pemerintah dan artikel akademis, untuk mendukung analisis mengenai isu HAM dalam gerakan *Boycott, Divestment, And Sanctions* (BDS) seperti website *BDS Movement*, *USCPR*, *Palestine Campaign*. Menurut Creswell data sekunder dapat memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti, serta membantu peneliti dalam memahami dinamika yang ada. Dengan demikian, data sekunder ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan tematik untuk menemukan pola dan makna terkait fungsi isu HAM dalam gerakan global *Boycott, Divestment, And Sanctions* (BDS) sebagai identitas kolektif dan dasar perlawanan dalam konteks internasional.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut John W. Creswell, analisis data dalam penelitian kualitatif, termasuk yang menggunakan pendekatan deskriptif, melibatkan beberapa langkah

¹⁴ Milya Sari, Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA" Natural Science. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>

teknis yang sistematis.¹⁵ Penelitian ini akan olah berdasarkan beberapa tahapan analisis data yang merujuk pada tulisan oleh John W. Creswell yang terdiri dari 6 urutan yaitu:

1. Mempersiapkan Data

Pengumpulan Data seperti dokumen, berita laporan dan catatan lapangan yang relevan dari badan institusional resmi. Peneliti akan mengumpulkan dokumen, artikel atau jurnal yang mencakup tentang isu HAM pada gerakan *Boycott, Divestment, And Sanctions* (BDS).

2. Membaca dan Memahami Data

Membaca Keseluruhan Data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang informasi yang ada. Dalam hal ini peneliti akan membaca serta memahami isi data yang telah dikumpulkan penulis guna sebagai rujukan penulis dalam tulisan ini.

3. Menganalisis Data Secara Mendetail

Deskripsi dan Interpretasi mendetail tentang setiap kategori dan interpretasikan makna dari data tersebut. Ini terkait peneliti akan menjelaskan isu HAM mempengaruhi gerakan *Boycott, Divestment, And Sanctions* (BDS).

4. Menyusun Narasi Hasil

Representasi hasil temuan dalam bentuk narasi atau laporan deskriptif yang jelas, mudah dipahami dan terstruktur. Penulis akan Menyusun narasi hasil dari temuan pengumpulan data agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan lebih terstruktur.

¹⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. (London: SAGE Publications, 1998), hlm. 37-38

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, peneliti dapat melakukan analisis data secara sistematis dan mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang Isu Hak Asasi Manusia terhadap gerakan BDS sebagai bentuk aksi kolektif dan bentuk perlawanan non-kekerasan dalam dinamika internasional.

1.8.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, teknik analisis data hingga sistematika penulisan.

BAB II ISU HAK ASASI MANUSIA (HAM) & GENOSIDA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Bab ini membahas isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan genosida dalam konflik Israel-Palestina dengan menggarisbawahi pelanggaran hak-hak fundamental yang dialami oleh warga Palestina akibat tindakan pendudukan dan agresi militer Israel. Pembahasan menyoroti bagaimana hak hidup, kebebasan bergerak, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak-anak sering terabaikan dan dilanggar secara sistematis. Selain itu, bab ini menguraikan definisi dan dimensi genosida berdasarkan instrumen hukum internasional, serta mengkaji bukti-bukti pelanggaran berat yang mengindikasikan adanya tindakan genosida dalam konteks konflik tersebut.

BAB III GERAKAN GLOBAL *BOYCOTT, DIVESTMENT, AND SANCTIONS* (BDS)

Bab ini membahas tentang gerakan global *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS), yang diprakarsai oleh masyarakat sipil Palestina sejak 2005 sebagai respon non-kekerasan terhadap pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Selain itu, dibahas pula peran penting organisasi dan komunitas internasional yang memberikan dukungan normatif dan advokasi, serta bagaimana efektivitas strategi boikot dan divestasi dalam menekan kebijakan Israel. Bab ini juga menyoroti beragam tantangan yang dihadapi BDS, baik dari sisi politik, legislasi anti-BDS, hingga stigma yang menempel pada gerakan tersebut.

BAB IV ANALISIS GERAKAN SOSIAL *BOYCOTT, DIVESTMENT, AND SANCTIONS* (BDS) DALAM MERESPON TINDAKAN GENOSIDA ISRAEL DI PALESTINA

Bab IV secara garis besar membahas bagaimana gerakan sosial *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) sebagai respons kolektif terhadap tindakan genosida Israel di Palestina dapat dianalisis dengan penggunaan kerangka teori gerakan sosial Charles Tilly. Melalui konsep mobilisasi kolektif, repertoire of contention, dan kualitas publik (*worthiness, unity, numbers, commitment*), bab ini menguraikan bagaimana BDS mampu membangun solidaritas global, mengorganisasi berbagai strategi aksi yang beragam, serta mempertahankan legitimasi politik dan moral di panggung internasional.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran terkait penelitian terutama poin-poin penting pembahasan dalam penelitian secara garis besar serta kontribusi penelitian ini pada dunia akademis dan masukkan yang akan diberikan untuk penelitian selanjutnya.